



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 2

TAHUN : 2010

SERI : B

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 62 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan aset daerah berupa penentuan titik strategis lokasi reklame yang akan memberikan manfaat ekonomis bagi penyelenggara reklame;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan reklame luar ruang diperlukan tata cara prosedur perizinan reklame, perhitungan pajak reklame dan prosedur pemanfaatan aset daerah yang berupa titik lokasi reklame;

- c. bahwa dengan berubahnya kelembagaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian agar pelaksanaan pengelolaan penyelenggaraan reklame dapat berjalan efektif, efisien dan optimal.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Jalan;
 - 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah DPPKA Kabupaten Kulon Progo.
5. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah DPU Kabupaten Kulon Progo.
6. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinhubkominfo adalah Dinhubkominfo Kabupaten Kulon Progo.
7. Kantor Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPT adalah KPT Kabupaten Kulon Progo.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satpol PP Kabupaten Kulon Progo.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame luar ruang adalah reklame yang ditempatkan diluar ruangan.

12. Konsesi adalah pembayaran yang dilakukan oleh penyelenggara reklame atas pemanfaatan lokasi reklame berdasarkan nilai strategis.
13. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah berupa barang berwujud dan barang tidak berwujud.
14. Hak pengelolaan adalah hak untuk mengelola titik lokasi reklame luar ruang.
15. Titik lokasi reklame adalah tempat berdirinya bangunan reklame luar ruang.
16. Kawasan/zona adalah batasan/batasan wilayah tertentu sesuai pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.
17. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau pihak lain yang menjadi tanggungannya.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan/perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.
21. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor Indentitas Wajib Pajak Daerah yang didapat dari hasil registrasi terhadap Subjek Pajak Daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
23. Jaminan Pembersihan adalah penempatan sejumlah uang tertentu dari penyelenggara reklame sebagai jaminan atas pelaksanaan pembersihan reklame, baik karena telah habis jangka waktu berlakunya atau karena terjadi pelanggaran atas perizinannya.
24. Perlengkapan Jalan adalah salah satu prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

BAB II

JENIS-JENIS REKLAME

Pasal 2

Jenis-jenis reklame, meliputi :

- a. Reklame papan adalah terdiri dari :
 - 1. Reklame papan nama adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastik fiberglas, plastik, kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenisnya dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantung/menempel pada bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen;
 - 2. Reklame megatron adalah reklame yang terbuat dari bahan besi, seng, alumunium, fiberglas dan plastik atau bahan lain yang sejenisnya, ditambah dengan peralatan mekanik dan elektrik yang dipasang berdiri dengan tiang dan/atau ditempelkan pada bangunan;
 - 3. Reklame bilboard adalah reklame dengan konstruksi permanen yang terbuat dari bahan besi, seng, alumunium, *fiberglas* dan plastik atau bahan lain yang sejenisnya dan dipasang berdiri dengan tiang atau ditempelkan pada bangunan;
 - 4. Reklame baliho adalah reklame dengan konstruksi semi permanen yang terbuat dari kayu, papan, multiplek, hardboard dan bambu atau bahan lain yang sejenisnya dan dipasang berdiri dengan tiang, yang peruntukannya untuk kegiatan tertentu; dan
 - 5. Reklame cahaya (*shopsign*) adalah reklame berbentuk tulisan dan/atau gambar yang terdiri dari atau dibentuk dari lampu elektrik atau alat lain yang bersinar.
- b. Reklame kain (spanduk, umbul-umbul, rontek dan banner) adalah reklame yang dibuat dari bahan kain, vinyl atau bahan lain yang dipersamakan;
- c. Reklame melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan ditempelkan atau melekat pada bangunan;
- d. Reklame selebaran adalah reklame yang disebarluaskan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan/dilekatkan pada benda lain;
- e. Reklame berjalan termasuk dalam kendaraan adalah reklame yang ditulis, ditempelkan atau dipasang pada kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih;
- f. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, pesawat atau alat lain yang sejenis;
- g. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat audio elektronik yang bersifat sementara; dan
- h. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan sesuatu dengan atau tanpa disertai suara.

BAB III

PROSES PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengajuan Izin

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib mengajukan permohonan izin dengan mengisi formulir surat permohonan izin penyelenggaraan reklame secara tertulis kepada Kepala KPT.

- (2) Formulir surat permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Formulir surat permohonan izin bagi penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan :
- a. foto copy KTP pemohon/identitas diri yang sah sebanyak rangkap 2 (dua);
 - b. foto copy NPWP sebanyak rangkap 2 (dua);
 - c. surat keterangan pajak reklame dari DPPKA bagi pemohon izin baru/awal;
 - d. foto copy surat setoran pajak daerah (pajak reklame) tahun sebelumnya sebanyak rangkap 2 (dua), untuk permohonan perpanjangan penyelenggaraan reklame;
 - e. gambar situasi/denah titik lokasi sebanyak rangkap 5 (lima);
 - f. gambar konstruksi dan perhitungannya untuk reklame megatron, bilboard dan baliho sebanyak rangkap 5 (lima);
 - g. gambar desain (foto) reklame yang akan dipasang sebanyak rangkap 3 (tiga);
 - h. rekomendasi dari Instansi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta apabila lokasi pemasangannya di Daerah Milik Jalan Negara atau Provinsi; dan
 - i. Surat Keterangan Kepemilikan yang dilegalisir Pemerintah Desa/Kecamatan untuk tanah perorangan.

- (4) Dalam hal penyelenggaraan reklame menempati tanah diluar daerah milik jalan yang merupakan tanah perorangan melampirkan surat izin atau bukti penggunaan tanah dimaksud dari pemilik tanah sebanyak rangkap 3 (tiga).

Bagian Kedua

Instansi Pemberi Izin

Pasal 4

- (1) Intansi yang berwenang menerbitkan izin adalah KPT.
- (2) Kepala KPT berwenang menandatangani izin, menolak permohonan penyelenggaraan reklame, surat peringatan/teguran bagi izin yang akan habis masa berlakunya dan melakukan pencabutan izin.

Pasal 5

- (1) Sebelum menerbitkan izin Kepala KPT melakukan koordinasi dengan DPU, DPPKA, Satpol PP dan Dinhubkominfo serta pihak lain yang terkait, untuk melakukan peninjauan lokasi bersama pihak pemohon guna menetapkan titik lokasi penyelenggaraan reklame dan melakukan klarifikasi terhadap persyaratan yang telah diajukan.
- (2) Peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi pemohon penyelenggaraan reklame baru untuk jenis reklame megatron, bilboard, dan baliho.

- (3) Titik-titik lokasi penyelenggaraan reklame di Ruang Daerah Milik Jalan Nasional dan Provinsi yang memerlukan rekomendasi Gubernur difasilitasi oleh KPT berdasarkan hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penetapan titik lokasi penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Peninjauan lokasi paling lambat sudah dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KPT.
- (6) Bentuk dan isi Berita Acara Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) pihak pemohon melengkapi persyaratan dan mengisi formulir surat permohonan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Formulir yang telah diisi dengan lengkap dan benar disertai persyaratannya disampaikan ke KPT.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Berita Acara dan isian formulir permohonan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KPT menerbitkan izin pemasangan reklame, setelah penyelenggara reklame

memenuhi kewajiban membayar pajak reklame dan konsesi yang telah dihitung dan ditetapkan oleh DPPKA.

- (2) Pembayaran Pajak Reklame dan konsesi melalui kasir KPT.
- (3) Penerimaan Pajak Reklame dan konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh) jam.
- (4) Penyetoran Pajak Reklame dan konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkap dan dilaporkan ke bendahara penerimaan DPPKA pada hari berikutnya disertai bukti setor.
- (5) Proses perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus sudah dilaksanakan 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya izin.
- (6) Bentuk dan isi surat izin penyelenggaraan reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyelenggaraan Reklame

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara reklame dalam penempatan reklamanya harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan, lingkungan, perhitungan konstruksi bangunan reklame dan tidak membahayakan orang lain atau bangunan lain disekitarnya.

- (2) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus billboard, baliho dan megatron dapat dilaksanakan di titik lokasi pada :
- a. sarana dan prasarana atau aset milik Daerah;
 - b. diluar sarana dan prasarana atau aset milik Daerah meliputi tanah dan bangunan milik badan atau perorangan;
 - c. titik lokasi pemasangan reklame paling kurang 60 (enam puluh) meter dari lampu *traffic light*;
 - d. pemasangan reklame di titik simpul kawasan tertentu dapat dimanfaatkan sepanjang mengindahkan estetika dan tidak menghalangi fungsi perlengkapan jalan;
 - e. titik lokasi pemasangan reklame paling kurang 60 (enam puluh) sentimeter dari *canstin* jalan dan tidak menghalangi fungsi perlengkapan jalan; dan
 - f. tinggi bagian bawah papan reklame paling kurang dari 6 (enam) meter dari permukaan jalan.

Pasal 9

- (1) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara pelelangan terbuka apabila lebih dari 1 (satu) pemohon.
- (2) Pelelangan terbuka diikuti oleh badan hukum atau perorangan yang berusaha dibidang reklame.
- (3) Pemenang lelang ditetapkan berdasarkan harga penawaran konsesi tertinggi dan lebih dari harga dasar konsesi reklamenya.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan reklame harus sesuai jumlah, lokasi dan lama pemasangan serta sesuai izin yang ditetapkan.
- (2) Reklame papan, megatron, bilboard, cahaya, berjalan termasuk pada kendaraan, jangka waktu penyelenggaranya paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Reklame baliho dan reklame udara untuk event tertentu, jangka waktu penyelenggaranya paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.
- (4) Reklame kain (spanduk, umbul-umbul, rontek dan banner) jangka waktu penyelenggaranya paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang serta tidak boleh melintang di atas jalan.
- (5) Reklame melekat (stiker) dan selebaran jangka waktu penyelenggaranya paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara reklame yang telah mendapatkan izin paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan izin dimaksud, harus sudah memasang reklamenya.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka penyelenggara reklame wajib mengganti dengan memasang himbauan publik/layanan masyarakat sampai dengan terpasangnya reklame sesuai yang tercantum dalam izin, dengan biaya dari penyelenggara reklame.

- (3) Penyelenggara reklame setelah memperoleh izin pemasangan reklame, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk jenis reklame kain, sebelum dipasang harus dibawa ke KPT untuk mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dalam bentuk stiker dan/atau stempel;
 - b. untuk jenis reklame melekat dan selebaran sebelum dipasang harus dibawa ke KPT untuk mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dalam bentuk perforasi; dan
 - c. untuk jenis reklame papan, megatron, bilboard, cahaya berjalan dan udara harus ditempeli stiker atau tanda lainnya sesuai masa berlaku izin yang ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Pihak penyelenggara reklame baru, dapat memasang reklame setelah mendapatkan izin.
- (2) Apabila penyelenggara reklame memasang reklame tidak sesuai atau menyimpang dari perizinan, maka KPT wajib menegur penyelenggara reklame untuk memasang reklame sesuai dengan yang diizinkan.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati oleh penyelenggara reklame, KPT melakukan tindakan pencabutan izin reklame.

- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan surat perintah untuk membersihkan, membongkar dan/atau menurunkan reklame.
- (6) Apabila surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diindahkan oleh penyelenggara reklame, maka pembersihan, pembongkaran dan/atau penurunan reklame dilaksanakan oleh Satpol PP bersama KPT dan DPPKA.
- (7) Pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat Berita Acara Pembongkaran, Pembersihan dan/atau Penurunan Reklame.
- (8) Barang bongkaran hasil pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disimpan di Satpol PP dan dibuatkan Berita Acara Penyimpanan Barang Bongkaran Reklame.
- (9) Barang bongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diambil oleh penyelenggara reklame dengan mengganti biaya pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame.
- (10) Besarnya biaya pengganti pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Pengganti biaya pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disetor ke Kas Daerah melalui kasir KPT.

- (12) Apabila barang bongkaran reklame dalam waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam tidak diambil dan tidak membayar biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka hasil bongkaran dimaksud menjadi milik Daerah untuk dilelang.
- (13) Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merupakan Pendapatan Daerah.

Pasal 13

- (1) KPT wajib memberitahukan secara tertulis kepada penyelenggara reklame mengenai berakhirnya jangka waktu izin pemasangan reklame billboard, reklame cahaya dan reklame megatron 30 (tiga puluh) hari sebelum izin reklame berakhir.
- (2) KPT wajib memberitahukan secara tertulis kepada penyelenggara reklame mengenai berakhirnya jangka waktu izin pemasangan reklame baliho, reklame kain, reklame stiker dan reklame melekat 7 (tujuh) hari sebelum izin reklame berakhir.
- (3) Apabila penyelenggara reklame tidak memperpanjang izin, maka penyelenggara reklame wajib membersihkan, membongkar, dan/atau menurunkan reklamenya.
- (4) Pembersihan, pembongkaran dan/atau penurunan reklame harus sudah dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal berakhirnya izin reklame.
- (5) Dalam hal pembersihan, pembongkaran dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan oleh penyelenggara reklame, maka

KPT wajib memberi surat teguran kepada penyelenggara reklame paling banyak 3 (tiga) kali teguran dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setiap kali teguran.

- (6) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diindahkan oleh penyelenggara reklame, maka pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame dilakukan oleh Satpol PP, KPT dan DPPKA dengan dibuatkan Berita Acara Pembongkaran, Pembersihan dan/atau Penurunan Reklame.
- (7) Barang hasil bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disimpan di Satpol PP dengan dibuatkan Berita Acara Penyimpanan Barang Hasil Bongkaran, Pembersihan dan/atau Penurunan Reklame serta rincian biaya pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame.
- (8) Besarnya pengganti biaya pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Barang hasil bongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diambil oleh penyelenggara reklame dengan mengganti biaya pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame.
- (10) Dalam hal barang bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam kurun waktu 30 (tiga puluh hari) hari kerja tidak diambil oleh penyelenggara reklame, maka barang bongkaran menjadi barang milik Daerah untuk selanjutnya dilelang.

- (11) Pengganti biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan penerimaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal reklame yang dipasang tidak berizin, maka Kepala DPPKA berkoordinasi dengan Satpol PP melaksanakan pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame.
- (2) Pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara Pembongkaran, Pembersihan dan/atau Penurunan Reklame dan hasil pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame disimpan di Satpol PP.
- (3) Hasil pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Barang Milik Daerah, selanjutnya dapat dilelang dan hasilnya merupakan Pendapatan Daerah.

Bagian Keempat

Kewajiban Teknis Penyelenggara Reklame

Pasal 15

- (1) Penyelenggara reklame megatron, reklame bilboard dan reklame baliho wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- memasang lampu untuk penerangan pada malam hari pada reklame dimaksud;

- menyediakan ruang untuk himbauan publik pada reklame;
- mengecat tiang penyangga reklame dengan warna hijau pare anom;
- memasang secara vertikal atau tidak boleh memasang reklame secara melintang di atas jalan.
- mencantumkan identitas penyelenggara reklame; dan
- menempelkan tanda izin pada bidang reklame.

- (2) Penyelenggara reklame untuk himbauan publik bersponsor, maka perbandingan luasnya adalah 5:1 (lima banding satu).

Bagian Kelima

Pemeliharaan dan Tanggung Jawab

Pasal 16

Untuk menjaga keselamatan umum dan keindahan lingkungan, maka penyelenggara reklame wajib memelihara reklame yang dipasang secara berkala.

Pasal 17

- Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari penyelenggara reklame menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.
- Keamanan keberadaan reklame dan kelengkapannya menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.

Bagian Keenam

Perlindungan

Pasal 18

- (1) Penyelenggara reklame mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah berupa jaminan bahwa reklame tetap terselenggara sampai berakhirnya masa izin.
- (2) Dalam hal/kedaan memaksa, keberadaan reklame harus dipindahkan sebelum berakhirnya masa izin, maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab KPT dan penyelenggara reklame.

BAB IV

DASAR PENGENAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame

Pasal 19

- (1) Penetapan besarnya pajak reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak ditentukan dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak Reklame.
- (2) Tarif pajak reklame sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).
- (3) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

Pasal 20

- (1) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dihitung sebagai berikut:
 - a. biaya pembuatan dan pemasangan;
 - b. biaya pemeliharaan;
 - c. lama pemasangan;
 - d. nilai strategis; dan
 - e. jenis reklame.

- (2) Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{NSR} = \frac{(\text{Luas Reklame} \times \text{BPP}/\text{m}^2) + (\text{Luas Reklame} \times \text{BP}/\text{m}^2)}{(\text{C}_2)} + (\text{NS} \times \text{C}_1)$$

Keterangan :

- NSR = Nilai Sewa Reklame;
 BPP = Biaya Pembuatan dan Pemasangan;
 BP = Biaya Pemeliharaan;
 NS = Nilai Strategis;
 C₁ = Koefisien Harga Titik Simpul;
 C₂ = Koefisien Lama Pemasangan.

Bagian Kedua

Komponen Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Pasal 21

- Komponen perhitungan nilai sewa reklame untuk biaya pembuatan dan pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame dan lama pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. untuk menghitung biaya pembuatan dan pemasangan ditentukan berdasarkan besarnya biaya standar yang dinyatakan dalam rupiah;

- b. untuk menghitung biaya pemeliharaan ditentukan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari biaya pembuatan dan pemasangan reklame kecuali untuk jenis reklame melekat, selebaran, peragaan, suara dan berjalan tidak diperhitungkan biaya pemeliharaan;
- c. untuk menghitung jenis reklame dan lama pemasangan reklame ditentukan dengan nilai koefisien; dan
- d. biaya standar, prosentase biaya pemeliharaan dan nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Nilai strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d ditentukan oleh faktor-faktor :
 - a. kawasan yang meliputi :
 - 1. kawasan khusus;
 - 2. kawasan campuran;
 - 3. kawasan perdagangan;
 - 4. kawasan pertokoan;
 - 5. kawasan perumahan;
 - 6. kawasan pariwisata;
 - 7. kawasan pendidikan;
 - 8. kawasan perkantoran;
 - 9. kawasan terbuka; dan
 - 10. kawasan perindustrian.
 - b. ukuran reklame;
 - c. sudut pandang;
 - d. fungsi jalan; dan
 - e. harga titik.

- (2) Untuk menghitung nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d masing-masing faktor dimaksud diberi bobot nilai.
- (3) Apabila terdapat pemasangan reklame masuk ke dalam lebih dari satu kawasan, maka nilai kawasan yang dipakai sebagai dasar perhitungan adalah nilai kawasan yang tertinggi.
- (4) Bobot dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf F yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Nilai strategis dihitung dari perolehan antara nilai titik dengan harga titik.
- (2) Nilai titik diperoleh dengan menjumlahkan perkalian antara bobot dan nilai dari seluruh faktor.
- (3) Untuk jenis reklame berjalan nilai titik tidak ditentukan berdasarkan perkalian antara bobot dan nilai tetapi langsung menggunakan harga titik jenis reklame berjalan.
- (4) Harga titik ditetapkan dalam rupiah.

Pasal 24

- (1) Untuk menentukan nilai strategis titik-titik pada lokasi reklame ditentukan satu titik simpul sebagai dasar perhitungan nilai strategis.

- (2) Titik simpul ditetapkan sebesar 9,8 (sembilan koma delapan) untuk jenis reklame pada kawasan khusus dengan luas reklame lebih besar dari $22,6 \text{ m}^2$ (dua puluh dua koma enam meter persegi), sudut pandang 3 (tiga) arah pada jalan arteri primer.
- (3) Harga titik simpul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf G yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Nilai strategis pemasangan reklame untuk jenis reklame selain megatron, bilboard dan baliho besarnya dihitung dan ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari nilai strategis reklame megatron, bilboard dan baliho.

Pasal 26

- (1) Penetapan Lokasi, Tingkat Strategis dan Fungsi Jalan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf H yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh Perhitungan Pajak Reklame, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Harga dasar pengenaan pajak reklame untuk reklame udara, reklame melekat, reklame selebaran, reklame film/slide, reklame peragaan dan reklame suara adalah :
 - a. Reklame udara : Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/buah/bulan;

- b. Reklame melekat :
 1. kurang dari 100 (seratus) lembar, pajak Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/lembar;
 2. 100 (seratus) sampai dengan 500 (lima ratus) lembar, pajak Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/lembar; dan
 3. lebih dari 500 (lima ratus) lembar, pajak Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/lembar.
 - c. Reklame selebaran :
 1. kurang dari 100 (seratus) lembar, pajak Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)/lembar;
 2. 100 (seratus) sampai dengan 500 (lima ratus) lembar, pajak Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/lembar; dan
 3. lebih dari 500 (lima ratus) lembar, pajak Rp. 400,00 (empat ratus rupiah)/lembar.
 - d. Reklame film/slide : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/tayangan;
 - e. Reklame peragaan : Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)/peragaan; dan
 - f. Reklame suara : Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)/hari.
- (2) Besarnya pajak untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari Harga Dasar Pengenaan Pajak Reklame dikalikan Tarif Pajak Reklame.

Bagian Ketiga

Proses Pembayaran Pajak

Pasal 28

- (1) Penyelenggara reklame yang sudah lengkap persyaratananya wajib mendaftarkan diri dengan mengisi formulir SPTPD yang telah disediakan DPPKA.
- (2) Formulir permohonan dan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemohon/wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk dan isi formulir SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf J yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan isian formulir SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), penyelenggara reklame diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP) sebagai identitas permanen atau tetap oleh DPPKA.
- (2) Berdasarkan isian formulir SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), DPPKA menetapkan besarnya Ketetapan Pajak Reklame dengan SKPD.
- (3) Wajib pajak membayar Pajak Reklame sesuai dengan yang tercantum dalam SKPD.

(4) Bentuk dan isian SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf K yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Setoran pajak daerah menggunakan SSPD.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEASAN PAJAK

Bagian Kesatu

Objek Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

Pasal 30

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dapat diberikan dalam hal reklame dimaksud mengandung misi pendidikan, kesenian/kebudayaan, olah raga, keagamaan dan pensuksesan program pemerintah yang tidak bertujuan untuk komersial atau diselenggarakan untuk usaha murni.
- (2) Keringanan pajak reklame nama usaha murni memperhatikan kemampuan pengusaha dengan keringanan paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus).
- (3) Besarnya pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Reklame selain reklame usaha murni, ditentukan oleh jenis misi sosial dan skala kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf L yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

Pasal 31

- (1) Wajib pajak mengajukan Surat Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala DPPKA.
- (2) Keputusan penolakan atau penerimaan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan ditandatangani oleh Kepala DPPKA untuk ketetapan pajak sampai dengan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Keputusan penolakan atau penerimaan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan ditandatangani oleh Wakil Bupati untuk ketetapan pajak diatas Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Dalam hal reklame insidentil yang akan diselenggarakan sedang mengajukan surat permohonan keringanan atau pembebasan pajak, dan belum mendapat Keputusan dari Bupati, Wakil Bupati atau Kepala DPPKA, maka penyelenggara wajib menyerahkan dahulu pajak sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari nilai pajak.

BAB VI

HARGA DASAR PERHITUNGAN KONSESI

Pasal 32

- (1) Harga Dasar Konsesi Reklame (HDKR) dihitung sebagai berikut :
 - a. nilai strategis titik lokasi reklame;
 - b. harga titik lokasi reklame; dan
 - c. luas bangunan reklame.
- (2) Perhitungan HDKR ditentukan dengan rumus sebagai berikut :
$$\text{HDKR} = \text{HPK} \times L$$

Keterangan :

 HDKR = Harga Dasar Konsesi Reklame;
 HPK = Harga Pasar Konsesi titik lokasi reklame;
 L = Luas bangunan reklame.
- (3) Harga pasar konsesi titik reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf M yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Contoh perhitungan harga dasar konsesi reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf N yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 Nomor 1 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 9 Desember 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 9 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI B**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 62 TAHUN 2010**

TENTANG

PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

A. SURAT PERMOHONAN PEMASANGAN REKLAME

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Nomor : Kepada :
Lampiran : Yth. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Perihal : Permohonan Izin Kabupaten Kulon Progo
Penyelenggaraan Reklame di Wates

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	=	Pasang baru	
Alamat	=	Perpanjangan	
No Telp/HP	=		
Nama Perusahaan	=		
Bidang Usaha	=		

Mohon izin memasang reklame :

No	Jenis Reklame	Ukuran	Jml	No	Jenis Reklame	Ukuran	Jml
1	Megatron			8	Selebaran		
2	Bilboard			9	Berjalan		
3	Baliho			10	Udara		
4	Papan Nama			11	Film/Slide		
5	<i>Shopsign</i> (Cahaya)			12	Suara		
6	Kain			13	Peragaan		
7	Melekat						

Sudut pandang :

1. segala arah 2. empat arah 3. tiga arah
4. dua arah 5. satu arah

Tempat pemasangan :

1. Lokasi = 3. Kawasan =
2. Jalan = 4. Fungsi Jalan =
.....

Ketinggian Reklame :

Tinggi dari permukaan tanah sampai dengan sisi bagian bawah reklame adalah m.

Lama Pemasangan :

1. hari/minggu/bulan/tahun.
2. Dari tanggal s/d tanggal

Isi reklame =

Keterangan lain =

Wates, Tahun
Pemohon

(.....)

B. BERITA ACARA PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN
REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
Jalan Perwakilan No. 1 Wates 55611 Telp. 773010 Fax. 773418

BERITA ACARA PENETAPAN TITIK LOKASI PENYELENGGARAAN
REKLAME

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. a. Nama :
(Wakil dari DPPKA Kabupaten Kulon Progo)
Jabatan :
- b. Nama :
(Wakil dari DPU Kabupaten Kulon Progo)
Jabatan :
- c. Nama :
(Wakil dari Dinhubkominfo Kabupaten Kulon Progo)
Jabatan :
- d. Nama :
(Wakil dari KPT Kabupaten Kulon Progo)
Jabatan :
- e. Nama :
(Wakil dari Satpol PP Kabupaten Kulon Progo)
Jabatan :

f. Nama :
(Wakil dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
Jabatan :

Secara bersama-sama betindak atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
(Wakil dari Pemohon Penyelenggaraan Reklame)
Jabatan :

Betindak untuk dan atas nama Pemohon Penyelenggaraan Reklame, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menetapkan titik lokasi di sebagai titik lokasi Penyelenggaraan Reklame kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA agar segera memproses perizinannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak serta untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

1. Wakil dari DPPKA

PIHAK KEDUA

Pemohon Penyelenggaraan Reklame

(.....)

(.....)

2. Wakil dari DPU

(.....)

3. Wakil dari Dinhubkominfo

(.....)

4. Wakil dari KPT

(.....)

5. Wakil dari Satpol PP

(.....)

6. Wakil dari Pemerintah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta

(.....)

C. SURAT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KANTOR PELAYANAN TERPADU
Jalan Purworejo Km. 1 Wates 55611

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Nomor : /IPR/ /20...

Menimbang : bahwa pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu diberikan Izin Penyelenggaraan Reklame pada tempat-tempat tertentu di Wilayah Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame;

MEMUTUSKAN :

Memberikan izin kepada :

Nama :
Alamat :

Untuk menyelenggarakan reklame pada tempat-tempat di Wilayah Kabupaten Kulon Progo,

Jenis Reklame :

Luas Reklame :

Jumlah Reklame :

Tempat Pemasangan Reklame :

Dengan syarat-syarat :

1. penyelenggara reklame harus tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. penyelenggara reklame wajib memelihara reklamanya;
3. sewaktu-waktu izin dapat dicabut, apabila terdapat penyelenggaraan reklame yang menyimpang dari izin dan/atau reklamanya membahayakan keselamatan, ketertiban dan kepentingan umum;
4. apabila batas waktu izin sudah habis dan/atau izin tidak diperpanjang lagi serta penyelenggara tidak membersihkan, membongkar dan/atau menurunkan reklame, maka pembersihan, pembongkaran dan/atau penurunan reklame dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dengan menggunakan uang jaminan pembersihan.
5. Izin ini berlaku mulai tanggal s/d

Wates, tanggal 20....
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu

(.....)
NIP.....

- Tembusan dikirim dengan hormat Kepada Yth. :
1. Kepala DPPKA Kabupaten Kulon Progo;
 2. Kepala DPU Kabupaten Kulon Progo;
 3. Kepala Dinhubkominfo Kabupaten Kulon Progo;
 4. Kepala Satpol PP Kabupaten Kulon Progo;
 5. Yang bersangkutan :.....

D. BIAYA PENGGANTI BONGKARAN

BESARAN UANG JAMINAN KEBERSIHAN

No	JENIS REKLAME	UANG JAMINAN PEMBERSIHAN (Rp)
1	2	3
1	Papan Nama	3.000,00 / m ²
2	Megatron	12.000,00 / m ²
3	Billboard	10.000,00 / m ²
4	Baliho	5.000,00 / m ²
5	Kain (Spanduk, Umbul-umbul, Rontek, dan Banner)	2.000,00 / lembar

E. BIAYA STANDAR, PROSENTASE BIAYA PEMELIHARAAN, DAN NILAI KOEFISIEN

No	JENIS REKLAME	BIAYA PEMBUATAN DAN PEMASANGAN	BIAYA PEMELIHARAAN	KOEFISIEN JENIS REKLAME	KOEFISIEN LAMA PEMASANGAN		
		(Rp)	N		(C1)	(C2)	
1	2	3	4	5	6		
1	Papan Nama	100.000,00 / m ²	10%	0.7	1	1 hari s/d 3 hari	10
2	Megatron	2.500.000,00 / m ²	10%	1	2	> 3 hari s/d 1 minggu	4
3	Billboard	250.000,00 / m ²	10%	1	3	> 1 minggu s/d 1 bulan	2.5
4	Baliho	150.000,00 / m ²	10%	1	4	> 1 bulan s/d 3 bulan	1.8
5	Shopsign (cahaya)	100.000,00 / m ³	10%	0.7	5	> 3 bulan s/d 6 bulan	1.4
6	Kain (Spanduk)	10.000,00 / m ⁴	10%	0.7	6	> 6 bulan s/d 9 bulan	1.2
7	Berjalan	175.000,00 / m ⁵	0%	1	7	> 9 bulan s/d 12 bulan	1

F. BOBOT DAN NILAI LOKASI

No Bobot	KAWASAN			UKURAN REKLAME			SUDUT PANDANG			FUNGSI JALAN		
	30%			60%			5%			5%		
	Tempat Pemasangan	Nilai	Nilai Titik	(m ²)	Nilai	Nilai Titik	Sudut pandang	Nilai	Nilai Titik	Fungsi Jalan	Nilai	Nilai Titik
1	Kawasan Khusus	10	3	? 22,6 m ²	10	6	Segala Arah pandang	10	0.5	Arteri Primer	0.5	0.5
2	Kawasan Campuran	9	2.7	20,1 m ² s/d 22,5 m ²	9	5.4	Empat arah	8	0.4	Arteri Sekunder	0.4	0.4
3	Kawasan Perdagangan	8	2.4	17,6 m ² s/d 20 m ²	8	4.8	Tiga Arah	6	0.3	Kolektor Primer	0.3	0.3
4	Kawasan Pertokoan	7	2.1	15,1 m ² s/d 17,5 m ²	7	4.2	Dua Arah	4	0.2	Kolektor Sekunder	0.2	0.2
5	Kawasan Perumahan	6	1.8	12,6 m ² s/d 15 m ²	6	3.6	Satu Arah	2	0.1	Lokal	0.1	0.1
6	Kawasan Wisata Alam	5	1.5	10,1 m ² s/d 12,5 m ²	5	3	-	-	-	-	-	-
7	Kawasan Pendidikan	4	1.2	7,6 m ² s/d 10 m ²	4	2.4	-	-	-	-	-	-
8	Kawasan Perkantoran	3	0.9	5,1 m ² s/d 7,5 m ²	3	1.8	-	-	-	-	-	-
9	Kawasan Terbuka	2	0.6	2,5 m ² s/d 5 m ²	2	1.2	-	-	-	-	-	-
10	Kawasan Perindustrian	1	0.3	? 2,5 m ²	1	0.6	-	-	-	-	-	-

G. HARGA TITIK SIMPUL

No	JENIS REKLAME	HARGA TITIK SIMPUL (Rp)
1	2	3
1	Papan Nama	75,000.00
2	Megatron	800,000.00
3	Billboard	800,000.00
4	Baliho	800,000.00
5	Shopsign (cahaya)	75,000.00
6	Kain (Spanduk)	75,000.00
7	Berjalan	350,000.00

H. PENETAPAN LOKASI, TINGKAT STRATEGIS, DAN FUNGSI JALAN

Nilai 10	T.S	T.J	Nilai 9	T.S	T.J	Nilai 8	T.S	T.J
(Kawasan Khusus)			(Kawasan Campuran)			(Kawasan Perdagangan)		
A. Jalan Jogja- Purworejo	STR	AP	1. Sepanjang Jalan Yoya – Purworejo dalam radius 250 m dari jembatan ke arah wilayah Kabupaten Kulon Progo.	STR	KP	1. Komplek Ruko Gawok Wates	STR	KP
1. Jembatan Bantar dalam radius 250 m dari jembatan ke arah wilayah Kabupaten Kulon Progo.	STR	AP	2. Simpang Tiga Ngeplang Sentolo dalam radius 200 m dari as Simpang Tiga.	STR	KP	2. Ruas Jalan Simpang Tiga Sentolo – Papah	STR	KP
2. Simpang Tiga Ngeplang Sentolo dalam radius 200 m dari as Simpang Tiga.	STR	AP	3. Tikungan Serut Sentolo dalam radius 100 m dari as tikungan.	STR	KP	3. Ruas Jalan Pertigaan Sentolo – Papah	STR	KP
3. Tikungan Serut Sentolo dalam radius 100 m dari as tikungan.	STR	AP	4. Simpang Tiga Sentolo dalam radius 200 m dari as Simpang Tiga.	STR	KP	4. Ruas Jalan Simpang Kenteng – Pasar Kenteng Nanggulan.	STR	KP
4. Simpang Tiga Sentolo dalam radius 200 m dari as Simpang Tiga.	STR	AP	5. Simpang Tiga Kenteng Nganggrung, Sentolo dalam radius 250 m dari as Simpang Tiga.	STR	KP			
5. Simpang Tiga Kenteng Nganggrung, Sentolo dalam radius 250 m dari as Simpang Tiga.	STR	AP	6. Simpang Tiga Milir dalam radius 250 m dari as Simpang Tiga.	STR	KP			
6. Simpang Tiga Milir dalam radius 250 m dari as Simpang Tiga.	STR	AP	7. Simpang Lima Karangnongko Wates dalam radius 250 m dari as Simpang Lima.	STR	KP			
7. Simpang Lima Karangnongko Wates dalam radius 250 m dari as Simpang Lima.	STR	AP	8. Simpang Tiga Terminal Wates dalam radius 250 m dari Simpang Tiga.	STR	KP			
8. Simpang Tiga Terminal Wates dalam radius 250 m dari Simpang Tiga.	STR	AP	9. Tikungan Dunggong Wates dalam radius 200 m dari as tikungan	STR	KP			
9. Tikungan Dunggong Wates dalam radius 200 m dari as tikungan	STR	AP	10. Simpang Tiga Dalangan Triharjo Wates dalam radius 250 m dari as Simpang Tiga.	STR	KP			
10. Simpang Tiga Dalangan Triharjo Wates dalam radius 250 m dari as Simpang Tiga.	STR	AP	11. Simpang Tiga Toyan Triharjo Wates dalam radius 250 m dari as Simpang Tiga.	STR	KP			
11. Simpang Tiga Toyan Triharjo Wates dalam radius 250 m dari as Simpang Tiga.	STR	AP						

12. Simpang Empat ke arah Pantai Glagah Temon dalam radius 100 m dari as Simpang Empat.	STR	AP							
13. Simpang Tiga Pangkalan Congot dalam radius 100 m dari as Simpang Tiga dan sampai batas wilayah Kabupaten Kulon Progo.	STR	AP							
B. Jalan Brosot – Toyan									
1. Jembatan Srandakan dalam radius 250 m dari jembatan ke arah wilayah Kabupaten Kulon Progo.	STR	AP							
2. Simpang Tiga Tugu Brosot Galur dalam radius 250 m dari as Simpang Tiga.	STR	AP							
3. Simpang Empat Nagung Wates dalam radius 250 m dari as Simpang Empat.	STR	AP							
C. Jalan Ngeplang Sentolo Kalibawang									
1. Simpang empat Kenteng Nanggulan dalam radius 250 m dari as Simpang Empat.	STR	AP							
2. Simpang Empat Dekso Kalibawang dalam radius 250 m dari as Simpang Empat.	STR	AP							

c. Jalan Gadingan – Mutihan – Teteg Timur.								
d. Jalan Sutijab Wates.								
e. Jalan M. Dawam Wates.								
f. Jalan Mutihan – Pasar Wates.								
g. Jalan Tentara Pelajar Wates.								

Nilai 4 (Kawasan Pendidikan)	T.S	T.J	Nilai 3 (Kawasan Perkantoran)	T.S	T.J	Nilai 2 (Kawasan Terbuka)	T.S	T.J
-----			-----			-----		
			1. Ruas Jalan Serut – Jalan Sugiman – Teteg Timur – Jalan Perwakilan Teteg Barat	S	KS	1. Congot (Jalan Deandeles)	K	AP
			2. Ruas Jalan Bhayangkara – Jalan Adhiyaksa – Jalan Tamtama – Jalan S. Parman – Teteg Barat.	S	KS	2. Ruas Jalan Teteg Barat – RSU Wates – Kokap.	S	KS
						3. Ruas Jalan SGO – Clereng.	K	KP
						4. Ruas Jalan Serang – Papah.	K	KP
						5. Ruas Jalan Kepek – Kalimanggis.	K	KS
						6. Ruas Jalan Girimulyo – Janti.	K	KP
						7. Ruas Jalan Ngeplang – Simpang Empat Kenteng Nanggulan.	S	AP
						8. Ruas Jalan Simpang Empat Kenteng Nanggulan – Klangon Kalibawang.	S	AP
						9. Ruas Jalan Dekso –Plono samigaluh.	S	AS
						10. Ruas Jalan Nagung – Bugel	K	L
						11. Ruas Jalan Ngelo Sentolo – Brosot.	K	KS
						12. Ruas Jalan Kenteng Nganggrung – Cangakan.	K	KS

Nilai 7 (Kawasan Pertokoan)	T.S	T.J	Nilai 6 (Kawasan Perumahan)	T.S	T.J	Nilai 5 (Kawasan Wisata Alam)	T.S	T.J
1. Ruas Jalan Nagung – Jembatan Bendungan	STR	AP/ KP	-----			1. Komplek Pantai Glagah.	K	KS
2. Ruas Jalan Karangnongko – Nagung	STR					2. Komplek Pantai Congot.	K	KS
3. Jalan dalam Kota Wates di luar area kawasan Khusus yaitu :	STR	KS/ KP				3. Komplek Pantai Trisik	K	KS
a. Jalan Brigjen Katamso.						4. Komplek Waduk Sermo.	K	KS
b. Jalan Diponegoro.						5. Komplek Gua Kiskenda.	K	L

					13. Ruas Jalan Sudu – Girimulyo – Jonggrangan – Perbatasan Purworejo.	K	KS
					14. Ruas Jalan Jombokan – Kokap.	K	KS
					15. Ruas Jalan Jombokan – Pripih.	K	KS
					16. Ruas Jalan Pasar kenteng Nanggulan – Plono Samigaluh.	K	KS
					17. Ruas jalan pendoworejo – Jonggrangan.	K	KS

Keterangan:

TS = Tingkat Strategis
FS = Fungsi Jalan

TS = Tingkat Strategis AP = Arteri Primer
FS = Fungsi Jalan AS = Arteri Sekunder

KP = Kolektor Primer
KS = Kolektor Sekunder

STR = Strategis
S = Sedang
K = Kurang

1. Tabel untuk Semua Jenis Reklame

2. TABEL INDEKS JENIS NASKAH DAN LOKASI STATUS TANAH

Jenis Reklame	Tanah Negara			Tanah Persil di atas Gedung			Tanah Persil di Halaman dan Facade			Tanah Persil di dalam Ruang		
	Rokok	Non Rokok	Nama Usaha	Rokok	Non Rokok	Nama Usaha	Rokok	Non Rokok	Nama Usaha	Rokok	Non Rokok	Nama Usaha
Megatron, Trivision, Cahaya, Papan/Billboard, Baliho.	10	2,2	1,5	6	1,7	1,1	5	1,6	1,1	3	1,4	1
Spanduk, Umbul-umbul, Rontek dan sejenisnya	1,4	1,2	1,1	1,2	1	0,9	1,1	0,9	0,8	1	0,8	0,7

3. Jenis Reklame : Papan Nama, Shopsign, Kain/Spanduk

		Nilai Sudut pandang dan Ukuran Luasan Segala Arah Pandang										
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	
		1.1	53,571	50,357	47,143	43,929	40,714	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643
HTS : 75,000	C1 : 70%	1.2	53,036	49,821	46,607	43,393	40,179	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107
		1.3	52,500	49,286	46,071	42,857	39,643	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571
		1.4	51,964	48,750	45,536	42,321	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036
		1.5	51,429	48,214	45,000	41,786	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500
		2.1	51,964	48,750	45,536	42,321	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036
		2.2	51,429	48,214	45,000	41,786	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500
		2.3	50,893	47,679	44,464	41,250	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964
		2.4	50,357	47,143	43,929	40,714	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429
		2.5	49,821	46,607	43,393	40,179	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893
		3.1	50,357	47,143	43,929	40,714	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429
Industri	Nilai Kawasan dan Fungsi Jalan	3.2	49,821	46,607	43,393	40,179	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893
		3.3	49,286	46,071	42,857	39,643	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357
		3.4	48,750	45,536	42,321	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	19,821
		3.5	48,214	45,000	41,786	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	19,286
		4.1	48,750	45,536	42,321	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	19,821
		4.2	48,214	45,000	41,786	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	19,286
		4.3	47,679	44,464	41,250	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	18,750
		4.4	47,143	43,929	40,714	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429	18,214
		4.5	46,607	43,393	40,179	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893	17,679
		5.1	47,143	43,929	40,714	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429	18,214
Terbuka	Nilai Kawasan dan Fungsi Jalan	5.2	46,607	43,393	40,179	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893	17,679
		5.3	46,071	42,857	39,643	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357	17,143
		5.4	45,536	42,321	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	19,821	16,607
		5.5	45,000	41,786	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	19,286	16,071
		6.1	45,536	42,321	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	19,821	16,607
		6.2	45,000	41,786	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	19,286	16,071
		6.3	44,464	41,250	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	18,750	15,536
		6.4	43,929	40,714	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429	18,214	15,000
		6.5	43,393	40,179	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893	17,679	14,464
		7.1	43,929	40,714	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429	18,214	15,000
Industri	Nilai Kawasan dan Fungsi Jalan	7.2	43,393	40,179	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893	17,679	14,464
		7.3	42,857	39,643	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357	17,143	13,929
		7.4	42,321	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	19,821	16,607	13,393
		7.5	41,786	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	19,286	16,071	12,857
		8.1	42,321	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	19,821	16,607	13,393
		8.2	41,786	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	19,286	16,071	12,857
		8.3	41,250	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	18,750	15,536	12,321
		8.4	40,714	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429	18,214	15,000	11,786
		8.5	40,179	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893	17,679	14,464	11,250
		9.1	40,714	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429	18,214	15,000	11,786
Terbuka	Nilai Kawasan dan Fungsi Jalan	9.2	40,179	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893	17,679	14,464	11,250
		9.3	39,643	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357	17,143	13,929	10,714
		9.4	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	19,821	16,607	13,393	10,179
		9.5	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	19,286	16,071	12,857	9,643
		10.1	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	19,821	16,607	13,393	10,179
		10.2	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	19,286	16,071	12,857	9,643
		10.3	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	18,750	15,536	12,321	9,107
		10.4	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429	18,214	15,000	11,786	8,571
		10.5	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893	17,679	14,464	11,250	8,036

	Nilai Sudut pandang dan Ukuran Luasan Empat (4) Arah										
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	
1.1	53,036	49,821	46,607	43,393	40,179	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893
1.2	52,500	49,286	46,071	42,857	39,643	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357
1.3	51,964	48,750	45,536	42,321	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	19,821
1.4	51,429	48,214	45,000	41,786	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	19,286
1.5	50,893	47,679	44,464	41,250	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	18,750
2.1	51,429	48,214	45,000	41,786	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	19,286
2.2	50,893	47,679	44,464	41,250	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	18,750
2.3	50,357	47,143	43,929	40,714	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429	18,214
2.4	49,821	46,607	43,393	40,179	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893	17,679
2.5	49,286	46,071	42,857	39,643	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357	17,143
3.1	49,821	46,607	43,393	40,179	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893	17,679
3.2	49,286	46,071	42,857	39,643	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357	17,143
3.3	48,750	45,536	42,321	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	19,821	16,607
3.4	48,214	45,000	41,786	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	19,286	16,071
3.5	47,679	44,464	41,250	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	18,750	15,536
4.1	48,214	45,000	41,786	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	19,286	16,071
4.2	47,679										

Industri	Nilai Sudut pandang dan Ukuran Luasan										
	Tiga (3) Arah										
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	Khusus
1.1	52,500	49,286	46,071	42,857	39,643	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	
1.2	51,964	48,750	45,536	42,321	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	
1.3	51,429	48,214	45,000	41,786	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	
1.4	50,893	47,679	44,464	41,250	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	
1.5	50,357	47,143	43,929	40,714	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429	
2.1	50,893	47,679	44,464	41,250	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	
2.2	50,357	47,143	43,929	40,714	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429	
2.3	49,821	46,607	43,393	40,179	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893	
2.4	49,286	46,071	42,857	39,643	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357	
2.5	48,750	45,536	42,321	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	19,821	
3.1	49,286	46,071	42,857	39,643	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357	
3.2	48,750	45,536	42,321	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	19,821	
3.3	48,214	45,000	41,786	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	19,286	
3.4	47,679	44,464	41,250	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	18,750	
3.5	47,143	43,929	40,714	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429	18,214	
4.1	47,679	44,464	41,250	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	18,750	
4.2	47,143	43,929	40,714	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429	18,214	
4.3	46,607	43,393	40,179	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893	17,679	
4.4	46,071	42,857	39,643	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357	17,143	
4.5	45,536	42,321	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	19,821	16,607	
5.1	46,071	42,857	39,643	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357	17,143	
5.2	45,536	42,321	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	19,821	16,607	
5.3	45,000	41,786	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	19,286	16,071	
5.4	44,464	41,250	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	18,750	15,536	
5.5	43,929	40,714	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429	18,214	15,000	
6.1	44,464	41,250	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	18,750	15,536	
6.2	43,929	40,714	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429	18,214	15,000	
6.3	43,393	40,179	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893	17,679	14,464	
6.4	42,857	39,643	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357	17,143	13,929	
6.5	42,321	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	19,821	16,607	13,393	
7.1	42,857	39,643	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357	17,143	13,929	
7.2	42,321	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	19,821	16,607	13,393	
7.3	41,786	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	19,286	16,071	12,857	
7.4	41,250	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	18,750	15,536	12,321	
7.5	40,714	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429	18,214	15,000	11,786	
8.1	41,250	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	18,750	15,536	12,321	
8.2	40,714	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429	18,214	15,000	11,786	
8.3	40,179	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893	17,679	14,464	11,250	
8.4	39,643	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357	17,143	13,929	10,714	
8.5	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	19,821	16,607	13,393	10,179	
9.1	39,643	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357	17,143	13,929	10,714	
9.2	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	19,821	16,607	13,393	10,179	
9.3	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	19,286	16,071	12,857	9,643	
9.4	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	18,750	15,536	12,321	9,107	
9.5	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429	18,214	15,000	11,786	8,571	
10.1	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	18,750	15,536	12,321	9,107	
10.2	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429	18,214	15,000	11,786	8,571	
10.3	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893	17,679	14,464	11,250	8,036	
10.4	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357	17,143	13,929	10,714	7,500	
10.5	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	19,821	16,607	13,393	10,179	6,964	

Industri	Nilai Sudut pandang dan Ukuran Luasan										
	Dua (2) Arah										
	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	Khusus
1.1	51,964	48,750	45,536	42,321	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	
1.2	51,429	48,214	45,000	41,786	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	20,893
1.3	50,893	47,679	44,464	41,250	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	19,821
1.4	50,357	47,143	43,929	40,714	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429	20,357
1.5	49,821	46,607	43,393	40,179	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893	19,826
2.1	50,357	47,143	43,929	40,714	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429	
2.2	49,821	46,607	43,393	40,179	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893	19,826
2.3	49,286	46,071	42,857	39,643	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357	19,826
2.4	48,750	45,536	42,321	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	19,821	19,826
2.5	48,214	45,000	41,786	38,571	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357	19,826
3.1	48,750	45,536	42,321	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	19,826	
3.2	48,214	45,000	41,786	38,571	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357	19,826
3.3	47,679	44,464	41,250	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	18,750	18,750
3.4	47,143	43,929	40,714	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429	18,214	18,214
3.5	46,607	43,393	40,179	36,964	33,750	30,536	27,321				

Nilai Kawasan dan Fungsi Jalan												
Industri	Terbuka	Nilai Sudut pandang dan Ukuran Luasan										
		Satu (1) Arah										
		5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	
Khusus	1.1	51,429	48,214	45,000	41,786	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	
	1.2	50,893	47,679	44,464	41,250	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	
	1.3	50,357	47,143	43,929	40,714	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429	
	1.4	49,821	46,607	43,393	40,179	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893	
	1.5	49,286	46,071	42,857	39,643	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357	
	2.1	49,821	46,607	43,393	40,179	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893	
	2.2	49,286	46,071	42,857	39,643	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357	
	2.3	48,750	45,536	42,321	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	19,821	
	2.4	48,214	45,000	41,786	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	19,286	
	2.5	47,679	44,464	41,250	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	18,750	
	3.1	48,214	45,000	41,786	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	19,286	
	3.2	47,679	44,464	41,250	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	18,750	
	3.3	47,143	43,929	40,714	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429	18,214	
	3.4	46,607	43,393	40,179	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893	17,679	
	3.5	46,071	42,857	39,643	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357	17,143	
	4.1	46,607	43,393	40,179	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893	17,679	
	4.2	46,071	42,857	39,643	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357	17,143	
	4.3	45,536	42,321	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	19,821	16,607	
	4.4	45,000	41,786	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	19,286	16,071	
	4.5	44,464	41,250	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	18,750	15,536	
Perdagangan	5.1	45,000	41,786	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	19,286	16,071	
	5.2	44,464	41,250	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	18,750	15,536	
	5.3	43,929	40,714	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429	18,214	15,000	
	5.4	43,393	40,179	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893	17,679	14,464	
	5.5	42,857	39,643	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357	17,143	13,929	
	6.1	43,393	40,179	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893	17,679	14,464	
	6.2	42,857	39,643	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357	17,143	13,929	
	6.3	42,321	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	19,821	16,607	13,393	
	6.4	41,786	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	19,286	16,071	12,857	
	6.5	41,250	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	18,750	15,536	12,321	
	7.1	41,786	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	19,286	16,071	12,857	
	7.2	41,250	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	18,750	15,536	12,321	
	7.3	40,714	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429	18,214	15,000	11,786	
	7.4	40,179	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893	17,679	14,464	11,250	
	7.5	39,643	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357	17,143	13,929	10,714	
Pendidikan	8.1	40,179	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893	17,679	14,464	11,250	
	8.2	39,643	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357	17,143	13,929	10,714	
	8.3	39,107	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	19,821	16,607	13,393	10,179	
	8.4	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	19,286	16,071	12,857	9,643	
	8.5	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	18,750	15,536	12,321	9,107	
	9.1	38,571	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	19,286	16,071	12,857	9,643	
	9.2	38,036	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	18,750	15,536	12,321	9,107	
	9.3	37,500	34,286	31,071	27,857	24,643	21,429	18,214	15,000	11,786	8,571	
	9.4	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893	17,679	14,464	11,250	8,036	
	9.5	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357	17,143	13,929	10,714	7,500	
	10.1	36,964	33,750	30,536	27,321	24,107	20,893	17,679	14,464	11,250	8,036	
	10.2	36,429	33,214	30,000	26,786	23,571	20,357	17,143	13,929	10,714	7,500	
	10.3	35,893	32,679	29,464	26,250	23,036	19,821	16,607	13,393	10,179	6,964	
	10.4	35,357	32,143	28,929	25,714	22,500	19,286	16,071	12,857	9,643	6,429	
	10.5	34,821	31,607	28,393	25,179	21,964	18,750	15,536	12,321	9,107	5,893	

4. Jenis Reklame : Megatron, Billboard, Baliho

HTS : 800,000 C1 : 100%												
Nilai Sudut pandang dan Ukuran Luasan Segala Arah Pandang												
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	
Khusus	1.1	816,327	767,347	718,367	669,388	620,408	571,429	522,449	473,469	424,490	375,510	
	1.2	808,163	759,184	710,204	661,224	612,245	563,265	514,286	465,306	416,327	367,347	
	1.3	800,000	751,020	702,041	653,061	604,082	555,102	506,122	457,143	408,163	359,184	
	1.4	791,837	742,857	693,878	644,898	595,918	546,939	497,959	448,980	400,000	351,020	
	1.5	783,673	734,694	685,714	636,735	587,755	538,776	489,796	440,816	391,837	342,857	
	2.1	791,837	742,857	693,878	644,898	595,918	546,939	497,959	448,980	400,000	351,020	
	2.2	783,673	734,694	685,714	636,735	587,755	538,776	489,796	440,816	391,837	342,857	
	2.3	775,510	726,531	677,551	628,571	579,592	530,612	481,633	432,653	383,673	334,694	
	2.4	767,347	718,367	669,388	620,408	571,429	522,449	473,469	424,490	375,510	326,531	
	2.5	759,184	710,204	661,224	612,245	563,265	514,286	465,306	416,327	367,347	318,367	
	3.1	767,347	718,367	669,388	620,408	571,429	522,449	473,469	424,490	375,510	326,531	
	3.2	759,184	710,204	661,224	612,245	563,265	514,286	465,306	416,327	367,347	318,367	
	3.3	751,020	702,041	653,061	604,082	555,102	506,122	457,143	408,163	359,184	310,204	
	3.4	742,857	693,878	644,898	595,918	546,939	497,959	448,980	400,000	351,020	302,041	
	3.5	734,694	685,714	636,735	587,755	538,776	489,796	440,816	391,837	342,857	293,878	
	4.1	742,857	693,878	644,898	595,							

Nilai Kawasan dan Fungsi Jalan

Industri	Terbuka	Nilai Sudut pandang dan Ukuran Luasan									
		Empat (4) Arah									
		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
1.1	808,163	759,184	710,204	661,224	612,245	563,265	514,286	465,306	416,327	367,347	
1.2	800,000	751,020	702,041	653,061	604,082	555,102	506,122	457,143	408,163	359,184	
1.3	791,837	742,857	693,878	644,898	595,918	546,939	497,959	448,980	400,000	351,020	
1.4	783,673	734,694	685,714	636,735	587,755	538,776	489,796	440,816	391,837	342,857	
1.5	775,510	726,531	677,551	628,571	579,592	530,612	481,633	432,653	383,673	334,694	
2.1	783,673	734,694	685,714	636,735	587,755	538,776	489,796	440,816	391,837	342,857	
2.2	775,510	726,531	677,551	628,571	579,592	530,612	481,633	432,653	383,673	334,694	
2.3	767,347	718,367	669,388	620,408	571,429	522,449	473,469	424,490	375,510	326,531	
2.4	759,184	710,204	661,224	612,245	563,265	514,286	465,306	416,327	367,347	318,367	
2.5	751,020	702,041	653,061	604,082	555,102	506,122	457,143	408,163	359,184	310,204	
3.1	759,184	710,204	661,224	612,245	563,265	514,286	465,306	416,327	367,347	318,367	
3.2	751,020	702,041	653,061	604,082	555,102	506,122	457,143	408,163	359,184	310,204	
3.3	751,020	702,041	653,061	604,082	555,102	506,122	457,143	408,163	359,184	310,204	
3.4	742,857	693,878	644,898	595,918	546,939	497,959	448,980	400,000	351,020	302,041	
3.5	726,531	677,551	628,571	579,592	530,612	481,633	432,653	383,673	334,694	285,714	
4.1	734,694	685,714	636,735	587,755	538,776	489,796	440,816	391,837	342,857	293,878	
4.2	726,531	677,551	628,571	579,592	530,612	481,633	432,653	383,673	334,694	285,714	
4.3	718,367	669,388	620,408	571,429	522,449	473,469	424,490	375,510	326,531	277,551	
4.4	710,204	661,224	612,245	563,265	514,286	465,306	416,327	367,347	318,367	269,388	
4.5	702,041	653,061	604,082	555,102	506,122	457,143	408,163	359,184	310,204	261,224	
5.1	710,204	661,224	612,245	563,265	514,286	465,306	416,327	367,347	318,367	269,388	
5.2	702,041	653,061	604,082	555,102	506,122	457,143	408,163	359,184	310,204	261,224	
5.3	693,878	644,898	595,918	546,939	497,959	448,980	400,000	351,020	302,041	253,061	
5.4	685,714	636,735	587,755	538,776	489,796	440,816	391,837	342,857	293,878	244,898	
5.5	677,551	628,571	579,592	530,612	481,633	432,653	383,673	334,694	285,714	236,735	
6.1	685,714	636,735	587,755	538,776	489,796	440,816	391,837	342,857	293,878	244,898	
6.2	677,551	628,571	579,592	530,612	481,633	432,653	383,673	334,694	285,714	236,735	
6.3	669,388	620,408	571,429	522,449	473,469	424,490	375,510	326,531	277,551	228,571	
6.4	661,224	612,245	563,265	514,286	465,306	416,327	367,347	318,367	269,388	220,408	
6.5	653,061	604,082	555,102	506,122	457,143	408,163	359,184	310,204	261,224	212,245	
7.1	661,224	612,245	563,265	514,286	465,306	416,327	367,347	318,367	269,388	220,408	
7.2	653,061	604,082	555,102	506,122	457,143	408,163	359,184	310,204	261,224	212,245	
7.3	644,898	595,918	546,939	497,959	448,980	400,000	351,020	302,041	253,061	204,082	
7.4	636,735	587,755	538,776	489,796	440,816	391,837	342,857	293,878	244,898	195,918	
7.5	628,571	579,592	530,612	481,633	432,653	383,673	334,694	285,714	236,735	187,755	
8.1	636,735	587,755	538,776	489,796	440,816	391,837	342,857	293,878	244,898	195,918	
8.2	628,571	579,592	530,612	481,633	432,653	383,673	334,694	285,714	236,735	187,755	
8.3	620,408	571,429	522,449	473,469	424,490	375,510	326,531	277,551	228,571	179,592	
8.4	612,245	563,265	514,286	465,306	416,327	367,347	318,367	269,388	220,408	171,429	
8.5	604,082	555,102	506,122	457,143	408,163	359,184	310,204	261,224	212,245	163,265	
9.1	612,245	563,265	514,286	465,306	416,327	367,347	318,367	269,388	220,408	171,429	
9.2	604,082	555,102	506,122	457,143	408,163	359,184	310,204	261,224	212,245	163,265	
9.3	595,918	546,939	497,959	448,980	400,000	351,020	302,041	253,061	204,082	155,102	
9.4	587,755	538,776	489,796	440,816	391,837	342,857	293,878	244,898	195,918	155,102	
9.5	579,592	530,612	481,633	432,653	383,673	334,694	285,714	236,735	187,755	146,939	
10.1	587,755	538,776	489,796	440,816	391,837	342,857	293,878	244,898	195,918	146,939	
10.2	579,592	530,612	481,633	432,653	383,673	334,694	285,714	236,735	187,755	138,776	
10.3	571,429	522,449	473,469	424,490	375,510	326,531	277,551	228,571	179,592	130,612	
10.4	563,265	514,286	465,306	416,327	367,347	318,367	269,388	220,408	171,429	122,449	
10.5	555,102	506,122	457,143	408,163	359,184	310,204	261,224	212,245	163,265	114,266	

Industri	Terbuka	Nilai Kawasan dan Fungsi Jalan									
		Nilai Sudut pandang dan Ukuran Luasan									
		3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10
1.1	800,000	751,020	702,041	653,061	604,082	555,102	506,122	457,143	408,163	359,184	
1.2	791,837	742,857	693,878	644,898	595,918	546,939	497,959	448,980	400,000	351,020	
1.3	783,673	734,694	685,714	636,735	587,755	538,776	489,796	440,816	391,837	342,857	
1.4	775,510	726,531	677,551	628,571	579,592	530,612	481,633	432,653	383,673	334,694	
1.5	767,347	718,367	669,388	620,408	571,429	522,449	473,469	424,490	375,510	326,531	
2.1	775,510	726,531	677,551	628,571	579,592	530,612	481,633	432,653	383,673	334,694	
2.2	767,347	718,367	669,388	620,408	571,429	522,449	473,469	424,490	375,510	326,531	
2.3	759,184	710,204	661,224	612,245	563,265	514,286	465,306	416,327	367,347	318,367	
2.4	751,020	702,041	653,061	604,082	555,102	506,122	457,143	408,163	359,184	310,204	
2.5	742,857	693,878	644,898	595,918	546,939	497,959	448,980	400,000	351,020	302,041	
3.1	751,020	702,041	653,061	604,082	555,102	506,122	457,143	408,163	359,184	310,204	
3.2	742,857	693,878	644,898	595,918	546,939	497,959	448,980	400,000	351,020	302,041	
3.3	734,694	685,714	636,735	587,755	538,776	489,796	440,816	391,837	342,857	293,878	
3.4	726,531	677,551	628,571	579,592	530,612	481,633	432,653	383,673	334,694	285,714	
3.5	718,367	669,388	620,408	571,429	522,449	473,469	424,490	375,510	326,531	277,551	
4.1	726,531	677,551	628,571	579,592	530,612	481,633	432,653	383,673	334,694	285,714	
4.2	718										

Industri	Tertinggi	Nilai Sudut pandang dan Ukuran Luasan											
		Dua (2) Arah											
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10		
	Khusus												
1.1	791,837	742,857	693,878	644,898	595,918	546,939	497,959	448,980	400,000	351,020			
1.2	783,673	734,694	685,714	636,735	587,755	538,776	489,796	440,816	391,837	342,857			
1.3	775,510	726,531	677,551	628,571	579,592	530,612	481,633	432,653	383,673	334,694			
1.4	767,347	718,367	669,388	620,408	571,429	522,449	473,469	424,490	375,510	326,531			
1.5	759,184	710,204	661,224	612,245	563,265	514,286	465,306	416,327	367,347	318,367			
2.1	767,347	718,367	669,388	620,408	571,429	522,449	473,469	424,490	375,510	326,531			
2.2	759,184	710,204	661,224	612,245	563,265	514,286	465,306	416,327	367,347	318,367			
2.3	751,020	702,041	653,061	604,082	555,102	506,122	457,143	408,163	359,184	310,204			
2.4	742,857	693,878	644,898	595,918	546,939	497,959	448,980	400,000	351,020	302,041			
2.5	734,694	685,714	636,735	587,755	538,776	489,796	440,816	391,837	342,857	293,878			
3.1	742,857	693,878	644,898	595,918	546,939	497,959	448,980	400,000	351,020	302,041			
3.2	734,694	685,714	636,735	587,755	538,776	489,796	440,816	391,837	342,857	293,878			
3.3	726,531	677,551	628,571	579,592	530,612	481,633	432,653	383,673	334,694	285,714			
3.4	718,367	669,388	620,408	571,429	522,449	473,469	424,490	375,510	326,531	277,551			
3.5	710,204	661,224	612,245	563,265	514,286	465,306	416,327	367,347	318,367	269,388			
4.1	718,367	669,388	620,408	571,429	522,449	473,469	424,490	375,510	326,531	277,551			
4.2	710,204	661,224	612,245	563,265	514,286	465,306	416,327	367,347	318,367	269,388			
4.3	702,041	653,061	604,082	555,102	506,122	457,143	408,163	359,184	310,204	261,224			
4.4	693,878	644,898	595,918	546,939	497,959	448,980	400,000	351,020	302,041	253,061			
4.5	685,714	636,735	587,755	538,776	489,796	440,816	391,837	342,857	293,878	244,898			
5.1	693,878	644,898	595,918	546,939	497,959	448,980	400,000	351,020	302,041	253,061			
5.2	685,714	636,735	587,755	538,776	489,796	440,816	391,837	342,857	293,878	244,898			
5.3	677,551	628,571	579,592	530,612	481,633	432,653	383,673	334,694	285,714	236,735			
5.4	669,388	620,408	571,429	522,449	473,469	424,490	375,510	326,531	277,551	228,571			
5.5	661,224	612,245	563,265	514,286	465,306	416,327	367,347	318,367	269,388	220,408			
6.1	669,388	620,408	571,429	522,449	473,469	424,490	375,510	326,531	277,551	228,571			
6.2	661,224	612,245	563,265	514,286	465,306	416,327	367,347	318,367	269,388	220,408			
6.3	653,061	604,082	555,102	506,122	457,143	408,163	359,184	310,204	261,224	212,245			
6.4	644,898	595,918	546,939	497,959	448,980	400,000	351,020	302,041	253,061	204,082			
6.5	636,735	587,755	538,776	489,796	440,816	391,837	342,857	293,878	244,898	195,918			
7.1	644,898	595,918	546,939	497,959	448,980	400,000	351,020	302,041	253,061	204,082			
7.2	636,735	587,755	538,776	489,796	440,816	391,837	342,857	293,878	244,898	195,918			
7.3	628,571	579,592	530,612	481,633	432,653	383,673	334,694	285,714	236,735	187,755			
7.4	620,408	571,429	522,449	473,469	424,490	375,510	326,531	277,551	228,571	179,592			
7.5	612,245	563,265	514,286	465,306	416,327	367,347	318,367	269,388	220,408	171,429			
8.1	620,408	571,429	522,449	473,469	424,490	375,510	326,531	277,551	228,571	179,592			
8.2	612,245	563,265	514,286	465,306	416,327	367,347	318,367	269,388	220,408	171,429			
8.3	604,082	555,102	506,122	457,143	408,163	359,184	310,204	261,224	212,245	163,265			
8.4	595,918	546,939	497,959	448,980	400,000	351,020	302,041	253,061	204,082	155,102			
8.5	587,755	538,776	489,796	440,816	391,837	342,857	293,878	244,898	195,918	146,939			
9.1	595,918	546,939	497,959	448,980	400,000	351,020	302,041	253,061	204,082	155,102			
9.2	587,755	538,776	489,796	440,816	391,837	342,857	293,878	244,898	195,918	146,939			
9.3	579,592	530,612	481,633	432,653	383,673	334,694	285,714	236,735	187,755	138,776			
9.4	571,429	522,449	473,469	424,490	375,510	326,531	277,551	228,571	179,592	130,612			
9.5	563,265	514,286	465,306	416,327	367,347	318,367	269,388	220,408	171,429	122,449			
10.1	571,429	522,449	473,469	424,490	375,510	326,531	277,551	228,571	179,592	130,612			
10.2	563,265	514,286	465,306	416,327	367,347	318,367	269,388	220,408	171,429	122,449			
10.3	555,102	506,122	457,143	408,163	359,184	310,204	261,224	212,245	163,265	114,286			
10.4	546,939	497,959	448,980	400,000	351,020	302,041	253,061	204,082	155,102	106,122			
10.5	538,776	489,796	440,816	391,837	342,857	293,878	244,898	195,918	146,939	97,959			
										97,959			

Industri	Tertinggi	Nilai Sudut pandang dan Ukuran Luasan											
		Satu (1) Arah											
		5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10		
	Khusus												
1.1	783,673	734,694	685,714	636,735	587,755	538,776	489,796	440,816	391,837	342,857	293,878		
1.2	775,510	726,531	677,551	628,571	579,592	530,612	481,633	432,653	383,673	334,694	285,714		
1.3	767,347	718,367	669,388	620,408	571,429	522,449	473,469	424,490	375,510	326,531	277,551		
1.4	759,184	710,204	661,224	612,245	563,265	514,286	465,306	416,327	367,347	318,367	269,388		
1.5	751,020	702,041	653,061	604,082	555,102	506,122	457,143	408,163	359,184	310,204	261,224		
2.1	759,184	710,204	661,224	612,245	563,265	514,286	465,306	416,327	367,347	318,367	269,388		
2.2	751,020	702,041	653,061	604,082	555,102	506,122	457,143	408,163	359,184	310,204	261,224		
2.3	742,857	693,878	644,898	595,918	546,939	497,959	448,980	400,000	351,020	302,041	253,061		
2.4	734,694	685,714	636,735	587,755	538,776	489,796	440,816	391,837	342,857	293,878	244,898		
2.5	726,531	677,551	628,571	579,592	530,612	481,633	432,653	383,673	334,694	285,714	236,735		
3.1	734,694	685,714	636,735	587,755	538,776	489,796							

I. CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

1. Penghitungan Pajak Reklame

$$\begin{aligned}\text{Pajak Reklame} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame} \\ &= 25\% \times \text{Nilai Sewa Reklame}\end{aligned}$$

Biaya Pembuatan dan atau Pemasangan + Biaya Pemeliharaan
 $\text{NSR} = \frac{\text{Biaya Pembuatan dan atau Pemasangan} + (\text{Nilai Startegis} \times \text{Jenis Reklame (CI)})}{\text{Lama Pemasangan (C2)}}$

$$\text{NSR} = \frac{\sum \text{Nilai Titik}}{\text{Titik Simpul}} \times \text{Harga Titik Simpul}$$

2. Penghitungan biaya pembuatan dan/atau pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame dan lama pemasangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- biaya pembuatan dan/atau pemasangan adalah biaya yang di keluarkan dalam rangka membuat reklame sampai dengan pemasangannya;
- biaya pemeliharaan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari biaya pemasangan kecuali untuk jenis reklame melekat, selebaran, udara, suara, peragaan dan berjalan. Biaya pemeliharaan sebesar 0 % (nol per seratus);
- Jenis Reklame (C1);
- Lama pemasangan (C2).

3. Penghitungan Nilai Strategis (NS) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Titik Simpul ditentukan 9,8
- Harga Titik simpul untuk Jenis Reklame
 - Megatron, Billboard, dan Baliho adalah Rp. 800.000,00
 - Reklame berjalan dan udara adalah Rp. 350.000,00
 - Papan, Kain (Spanduk), film slide dan cahaya (*shopsign*) dan reklame melekat adalah Rp. 75.000,00

4. Contoh Perhitungan Pajak Reklame

- Sebuah reklame jenis Billboard dipasang di Perempatan Ngeplang (Kawasan Khusus) dengan ukuran $5m \times 10m = 50 m^2$ dengan sudut pandang 2 (dua) arah pada fungsi jalan arteri primer untuk jangka waktu pemasangan 1 tahun. Cara menghitung pajak Reklame yang harus dibayar oleh penyelenggara adalah :

$$\begin{aligned}\text{NS} &= \frac{\sum \text{Nilai Titik}^{a)} }{\text{Titik Simpul}^{b)}} \times \text{Harga Titik Simpul}^{c)} \\ &= \frac{3 + 6 + 0,3 + 0,5}{9,8} \times \text{Rp. } 800.000,00 \\ &= \underline{\text{Rp. } 800.000,00}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{NSR} &= \frac{(\text{Luas Reklame} \times \text{Biaya Pembuatan dan atau Pemasangan}/m^2)^d)}{\text{Koefisien Lama Pemasangan (C2)}^{e)}} + (\text{NS} \times \text{Koefisien Jenis Reklame (C1)})^{e)} \\ &= \frac{(50m^2 \times \text{Rp } 250.000,00) + (50m^2 \times \text{Rp } 20.000,00)}{1} + (\text{Rp. } 800.000,- \times 1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \text{Rp. } 10.000.000,00 + \text{Rp. } 1.250.000,00 + \text{Rp. } 800.000,00 \\ &= \underline{\text{Rp. } 14.450.000,00}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Pajak Reklame} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NSR} \\ &= 25\% \times \text{Rp. } 14.450.000,00 \\ &= \text{Rp. } 3.637.500,00 \text{ atau (per meter } \text{Rp. } 72.750,00)\end{aligned}$$

- Sebuah reklame jenis Spanduk dipasang di Komplek Perdagangan Wates dengan ukuran $0,9 m \times 8 m = 7,2 m$ dengan sudut pandang 2 arah pada fungsi jalan arteri sekunder untuk jangka waktu pemasangan 3 bulan.

$$\begin{aligned}\text{NS} &= \frac{\sum \text{Nilai Titik}}{\text{Titik Simpul}} \times \text{Harga Titik Simpul} = \frac{(0,3 \times 7,2) + (0,6 \times 3) + (0,05 \times 4) + (0,05 \times 8)}{9,8} \\ &= \frac{2,1 + 1,8 + 0,2 + 0,4}{9,8} \times \text{Rp } 75.000,00 = \frac{4,5}{9,8} \times \text{Rp } 75.000,00 \\ &= \underline{\text{Rp } 34.439,00}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{NSR} &= \frac{\text{Biaya Pembuatan dan/atau Pemasangan} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Lama Pemasangan (C2)}} + (\text{NS} \times \text{Jenis Reklame (CI)}) \\ &= \frac{(\text{7,2}m^2 \times \text{Rp } 10.000,00) + (0,01 \times 7,2 m^2 \times \text{Rp } 10.000,00)}{1,8} + (\text{Rp } 34.439,- \times 0,7 m^2) \\ &= \frac{\text{Rp } 72.000,00 + \text{Rp } 7.200,00}{1,8} + (\text{Rp } 24.107,-) \\ &= \underline{\text{Rp } 68.107,00}\end{aligned}$$

Pajak Reklame = Tarif Pajak X NSR
= 25 % X Rp 68.107,00
= Rp 17.026,75,00 atau Rp 2.364,83,00/ m²

Keterangan :

- a). \sum Nilai Titik terdapat dalam Lampiran F
 - b). Titik Simpul terdapat dalam ketentuan Pasal 24
 - c). Harga Titik Simpul terdapat dalam Lampiran G
 - d). Biaya Pembuatan dan atau Pemasangan serta Biaya Pemeliharaan terdapat dalam Lampiran H (Tabel 1)
 - e). C1 dan C2 terdapat dalam Lampiran E
5. Contoh Perhitungan Jaminan Pembersihan
Sebuah Reklame jenis Billboard dipasang di Perempatan Ngeplang (Kawasan khusus) dengan ukuran 5m x 10m = 50 m² dengan sudut pandang 2 (dua) arah pada fungsi jalan arteri primer untuk jangka waktu pemasangan 1 tahun.
Maka besarnya uang jaminan pembersihan yang harus dibayar oleh pihak penyelenggara Reklame adalah = 50 m² x Rp 100.000,- = Rp 500.000,00

J. BENTUK DAN ISIAN FORMULIR SPTPD

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KAB. KULON PROGO DPPKA Jalan Perwakilan No.1 Wates</p>	<p style="text-align: center;">SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</p>	<p style="text-align: center;">Kepada Yth. Kepala DPPKA Kab. Kulon Progo Di Wates</p>
UNTUK WAJIB PAJAK BADAN/PEMILIK USAHA		
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Setelah diisi dan ditandatangani, diserahkan kepada DPPKA Kabupaten Kulon Progo, paling lambat tanggal <input type="text"/> bulan <input type="text"/> tahun <input type="text"/> <input type="text"/>. 3. Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> pada kotak yang telah disediakan untuk jawaban yang diberikan. 4. Diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada tanggal <input type="text"/> bulan <input type="text"/> tahun <input type="text"/> <input type="text"/> 5. Harap menggunakan lembara lain, jika jawaban yang diberikan tidak cukup dalam kolom yang diberikan. 		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK		
Nama Badan/Merk : <input type="text"/> Alamat : <input type="text"/> NPWP/D : <input type="text"/> Nama Pemilik/Pengusaha : <input type="text"/> Alamat : <input type="text"/> Surat Penunjukan : <input type="text"/> <input type="text"/> 1.Tempat Usaha : 1.1 No. SITU/HO : <input type="text"/> 1.2 Bidang Usaha : <input type="text"/> 2.Reklame : 2.1 Isi : <input type="text"/> 2.2 Jenis Reklame : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> - Selebaran <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - Berjalan <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - Udara <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - Film/Slide <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - Suara <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - Peragaan <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

2.3 Lokasi Penyelenggaraan			
a.Tanah Perorangan :			
- Lokasi :	- Kawasan :		
- Jalan :	- Fungsi Jalan :		
b.Tanah Pemerintah/Negara :			
- Lokasi :	- Kawasan :		
- Jalan :	- Fungsi Jalan :		
2.4 Ukuran/Luas Reklame :			
Panjang :	Lebar :	Luas :	
2.5 Sudut Pandang :			
- Segala Arah	<input type="checkbox"/>	- Dua Arah	<input type="checkbox"/>
- Empat Arah	<input type="checkbox"/>	- Satu Arah	<input type="checkbox"/>
- Tiga Arah	<input type="checkbox"/>		
2.6 Jangka Waktu/Lama Pemasangan :			
-	Hari/Minggu/Bulan/Tahun		
- Mulai	Sampai dengan :		
3.Perusahaan yang memasang reklame (Harap dilampirkan nama perusahaan dan tanggal pemasangan)			
PEMASANGAN			
Yang bertandatangan dibawah ini :			
Nama :			
Alamat :			
Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ini saya isi dengan benar, lengkap dan tidak bersyarat, apabila SPTPD ini kami sampaikan tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
, tanggal : Wajib Pajak,		
DIISI OLEH PETUGAS DPPKA KABUPATEN KULON PROGO			
Diterima tanggal			
Nama petugas			
NIP			
Tanda tangan			

K. BENTUK DAN ISIAN SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DPPKA Jalan Perwakilan No.1 Wates	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) TAHUN :	NO. KOHIR	
NAMA :	ALAMAT :		
NPWP :			
Batas Penyetorannya terakhir tanggal :			
No	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah
			Jumlah Ketetapan pokok pajak Denda
			Rp. Rp.
			Jumlah Ketetapan pokok pajak+Denda
			Rp.
Dengan huruf : (.....)			
PERHATIAN :			
<ol style="list-style-type: none"> Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tandatangan Bendahara Penerima. Keterlambatan penyetoran dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. 			
Wates, tgl.....tahun..... an. Kepala DPPKA Kabupaten Kulon Progo			
Penyetor, (.....)	Pengesahan Penyetoran, (.....) NIP.	Pejabat Penetapan (.....) NIP.	

MODEL : DPD 11-17

..... potong disini

TANDA TERIMA SKPD

NAMA :
 ALAMAT :
 NPWP :

....., tahun
 Yang menerima,
 (.....)

L. TABEL KERINGANAN MAKSIMAL PAJAK

No	Kegiatan	Skala Kegiatan		
		Lokal	Nasional	Internasional
1	Pendidikan	100%	75%	50%
2	Kesenian/Kebudayaan	75%	50%	30%
3	Olahraga	75%	50%	30%
4	Keagamaan	100%	100%	100%
5	Terkait dengan Program Pemerintah	100%	75%	50%

M. HARGA PASAR KONSENSI TITIK LOKASI REKLAME

1. JENIS REKLAME BILBOARD DAN MEGATRON

NO	Kawasan	Harga Pasar Dalam rupiah per m ² per tahun			
		4 Arah	3 Arah	2 Arah	1 Arah
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Khusus	250,000	225,000	200,000	175,000
2	Campuran	200,000	175,000	150,000	125,000
3	Perdagangan	175,000	150,000	125,000	100,000
4	Pertokoan	150,000	125,000	100,000	75,000
5	Perumahan	125,000	100,000	75,000	50,000
6	Wisata Alam	100,000	75,000	50,000	25,000
7	Pendidikan	75,000	50,000	25,000	-
8	Perkantoran	50,000	25,000	-	-
9	Terbuka	25,000	-	-	-
10	Industri	-	-	-	-

2. JENIS REKLAME BALIHO

NO	Kawasan	Harga Pasar Dalam rupiah per m ² per tahun			
		4 Arah	3 Arah	2 Arah	1 Arah
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Khusus	25,000	22,500	20,000	17,500
2	Campuran	22,500	20,000	17,500	15,000
3	Perdagangan	20,000	17,500	15,000	12,500
4	Pertokoan	17,500	15,000	12,500	10,000
5	Perumahan	15,000	12,500	10,000	7,500
6	Wisata Alam	12,500	10,000	7,500	5,000
7	Pendidikan	10,000	7,500	5,000	-
8	Perkantoran	7,500	5,000	-	-
9	Terbuka	5,000	-	-	-
10	Industri	-	-	-	-

N. CONTOH PERHITUNGAN HARGA DASAR KONSESI REKLAME (HDKR)

Sebuah reklame jenis Billboard dipasang di Perempatan Ngeplang (Kawasan khusus) dengan ukuran 5m X 10m = 50 m² dengan sudut pandang 2 (dua) arah pada fungsi jalan arteri primer untuk jangka waktu pemasangan 1 tahun.

Cara menghitung HDKR yang harus dibayar oleh penyelenggara adalah :

$$\begin{aligned} \text{HDKR} &= \text{HPK} \times L \\ &= \text{Rp } 200.000,00 \times 50 \text{ m}^2 \\ &= \text{Rp } 10.000.000,00 \end{aligned}$$

Jadi besarnya Harga Dasar Konsesi Reklame Billboard di Ngeplang dengan luasan 50 m² adalah Rp 10.000.000,00

Wates, 9 Desember 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO